Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 |

**SUBBAGIAN HUMAS**

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | |
|---|---|
| Media Online | |
| Media Cetak | Pos Kota |

# Program Pengadaan Toa Dibatalkan

## Tak Efektif Jadi Peringatan Dini Banjir

**GAMBIR (Pos Kota)** – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan tidak melanjutkan program pengadaan pengeras suara atau toa sebagai program *early warning system* (sistem peringatan dini) bencana banjir di Jakarta.

"Program pengadaan alat peringatan dini, toa sudah dibatalkan. Hal itu karena terjadi refocusing anggaran untuk dialihkan dalam penanganan Covid-19," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Muhammad Insaf, Senin (10/8) di Jakarta.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai, peringatan dini banjir di Jakarta melalui toa tidak efektif. Kendati demikian, Insaf mengatakan, pembatalan program tersebut bukan karena teguran Anies. Namun, ada relokasi anggaran untuk penanganan wabah Virus Corona (Covid-19).

Insaf menjelaskan dari hasil evaluasi, program toa sebagai peringatan dini banjir tidak berjalan efektif. Pihaknya akan mengkaji lebih lanjut soal rencana ke depan untuk menggantikan toa sebagai peringatan dini banjir.

"Dari hasil evaluasi program ini tidak berjalan efektif dan bukan *early warning system*, karena sistem itu seharusnya berisi informasi yang jelas seputar peringatan dini banjir," jelasnya.

Seperti diketahui, pada awal tahun ini Pemprov DKI berencana menambah enam set disaster warning system (DWS) atau toa untuk peringatan dini bencana dengan anggaran sebesar Rp4.362.501.441 (Rp4,3 miliar), untuk melengkapi 14 set DWS yang sudah ada sebelumnya.

Angka Rp4,3 miliar itu masuk dalam Program Pengelolaan Risiko Bencana. Di dalamnya terdiri dari kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Pusat Data dan Informasi Kebencanaan (DIMS, EWS, Medsos dan Call Center 112). **(yono/ta)**